BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Direktorat Jenderal Pajak melakukan terobosan dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dengan melakukan modernisasi perpajakan, modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan wujud dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan sejak tahun 2002, penerapan sistem perpajakan modern dilakukan dengan mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak, yang mencakup aspek-aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja Kantor Pelayanan Pajak, perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Agus martowardojo, 2010).

Informasi yang tersedia dan digunakan manajemen sangat membantu dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga diharapkan kinerja akan meningkat, seperti yang dinyatakan oleh Atkinson et al (1995: 5) bahwa informasi yang dihasilkan dari sistem informasi dapat digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi dari unit organisasi atau perusahaan. (Agus, 2009) Menyatakan Direktorat Jenderal Pajak memerlukan informasi yang berkualitas untuk meningkatkan kinerja, informasi yang berkualitas diharapkan sebagai output suatu sistem informasi dalam organisasi. *Larcker et al*

dalam jogiyanto (2007) menjelaskan pula kualitas informasi mengukur keluaran dari sistem informasi, *lacker* pun mengenbangkan enam item pertannyaan untuk mengukur kepentingan persepsi dan kegunaan informasi dari informasi yang disajikan di laporan-laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi.

Sistem informasi senantiasa mengalami perubahan besar, dimungkinkan karena sistem informasi beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam instansi itu sendiri atau dengan lingkungannya, kemudian pada hakikatnya, akuntansi merupakan penerapan teori umum informasi terhadap masalah operasi yang ekonomik dan efisien, akuntasi juga membentuk sebagian besar informasi umum yang dinyatakan secara kuantitatif, dalam konsep sistem informasi akuntansi ini, akuntansi menjadi bagian dari sistem informasi umum dari suatu kesatuan yang beroperasi sekaligus menjadi bagian dari suatu bidang yang dibatasi oleh informasi, kemampuan instansi dalam mengumpulkan, mengelola dan menggunakan informasi akan menentukan apakah suatu instansi bersih atau tidak, salah satu syaratnya adalah tersedianya sistem akuntansi yang akurat di instansi tersebut, dengan tersedianya sistem akuntansi yang akurat, mudah dioperasikan, mempersingkat waktu serta efektif pada saat ini merupakan salah satu solusi agar organisasi atau instansi dapat dipercaya oleh masyarakat dan diharapkan instansi tersebut dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, sehingga dapat terus berkembang pada masa yang akan datang, pendekatan sistem berusaha menjelaskan sesuatu dari sudut pandang sistem, yang berusaha menemukan struktur unsur yang membentuk sistem tersebut dan mengidentifikasi proses bekerjanya setiap unsur yang membentuk sistem tersebut, setiap sistem dibuat

untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi (Aditya, 2010).

Direktorat Jenderal Pajak memiliki sistem informasi yang dikembangkan yaitu sistem informasi yang memiliki *core* kepada pelayanan pada wajib pajak dan sistem informasi yang bukan termasuk *core* pelayanan yaitu sistem informasi akuntansi, yaitu Program Aplikasi Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3) yang sekarang digantikan Oleh Modul Penerimaan Negara (MPN), dan SIKKA, MP3 berfungsi untuk memonitor dan mengawasi penerimaan pajak secara *on-line*, aplikasi MP3 ini adalah bagian dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), namun sekarang, penggunaan MP3 sudah digantikan dengan Program yang lebih maju dari MP3 yaitu Program Modul Penerimaan Negara (MPN), Sistem ini adalah suatu sistem yang terstruktur untuk mengatur proses penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan Negara, MPN merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), sistem ini mengintegrasikan tiga sistem penerimaan yang selama ini berjalan, yaitu Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) oleh Ditjen Pajak, Sistem Elektronik Data *Intercharge* (EDI) oleh Ditjen Bea dan Cukai, dan Sistem Penerimaan Negara (Sispen) oleh Ditjen Anggaran, Sedangkan Sistem informasi akuntansi Direktorat jenderal pajak yang lain adalah Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva (SIKKA), Sistem ini terpisah dari SIDJP yang selama ini kita kenal, Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva (SIKKA) ini adalah aplikasi yang digunakan

untuk melaporkan data dan aktivitas pegawai pajak dan juga aktivitas keuangan Kantor pelayanan pajak, KPP adalah bagian dari instansi pemerintah yaitu dibawah lembaga Departemen Keuangan, Departemen Keuangan adalah salah satu instansi pemerintah yang harus mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan anggaran untuk belanja rutin, Pertanggungjawaban tersebut membutuhkan informasi akuntansi yang diperoleh dari SIKKA (SE - 24/PJ/2010).

MPN dan SIKKA di KPP dirasa lambat saat ini karena *server* yang ada masih terbatas, jadi aksesnya menjadi lambat, seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Kasubag Umum di KPP Karees, SIDJP biasanya hanya digunakan di pulau Jawa sedangkan di luar Jawa masih memakai SIPMod, Karena SIDJP mengandalkan jaringan maka *server* itu sangat penting bagi SIDJP yang merupakan sistem yang terintegrasi ke seluruh Indonesia, akibatnya Kantor Pelayana Pajak bisa terganggu masalah migrasi data dan kesulitan mendapat data / informasi yang sifatnya penting dan mendesak, selain itu proses transfer data/ informasi melalui SIDJP sangat "lemot" ini mungkin dikarenakan adanya tubrukan data saat pengiriman data secara bersamaan antar KPP (Ahmad, 2011). Selain itu informasi yang dihasilkan DJP belum mencapai kualitas yang diharapkan, (Mel-kias, 2008) mengatakan bahwa data realisasi penerimaan pajak belum terintegrasi, hal ini membuat sering terjadi perbedaan pencatatan antara Ditjen Pajak dan Ditjen Perbendaharaan Negara, penerimaan perpajakan dicatat oleh Ditjen Pajak dalam SAI dengan menggunakan modul penerimaan negara (MPN) dan Ditjen Perbendaharaan Negara mencatatkannya dalam kas negara dengan sistem SAU, perbedaan pencatatan sebelumnya, dalam LHP atas LKPP tahun 2008. BPK

juga sudah menemukan adanya perbedaan realisasi penerimaan perpajakan menurut SAI dan kelemahan pencatatan penerimaan perpajakan dalam aplikasi modul penerimaan negara (MPN), penyebab lainnya adalah penerimaan PPh Pasal 23 juga turun 6,5%, karena turunnya volume transaksi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan PPh Pasal 25 dan 29 orang pribadi yang juga turun 23,3% karena pada 2009 masih terdapat tambahan penerimaan dari program sunset *policy* Januari-Februari 2009 (lachmad aris, 2010).

Terkuaknya kasus pajak Gayus Tamabunan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membuat sistem pengendalian intern oleh Ditjen Pajak menjadi sorotan tajam Panitia Kerja Perpajakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahkan DPR menuding bahwa selama ini sistem pengendalian Ditjen Pajak tidak berjalan sebagaimana mestinya karena marak dengan kebocoran penerima pajak, yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, **e***arly warning* sistem itu tidak berjalan atau tidak ada maknanya, jika *early warning* sistem itu tidak ada, artinya sistem informasi gagal desain, salah satu hal yang salah ditubuh Ditjen Pajak yaitu mengenai interpretasi dari fungsi intelijen dan penyelidikan, untuk ini semestinya tidak hanya mengawasi para wajib pajak, namun juga petugas pajaknya, karena keduanya saling bersinggungan dan memiliki keterkaitan, kemampuan intelijen ini bukan hanya buat Wajib Pajak saja, tapi juga buat petugas pajaknya, jadi ada dua sisi, seperti ini yang harus dikembangkan, disinyalir jika kasus Gayus ini bukanlah yang pertama sehingga Ditjen Pajak mesti sering menumpas Gayus-Gayus lainnya yang kemungkinan masih ada (Ecky Awal Mucharam 2010). Selain itu, (Mayasyak Johan, 2010) juga

menyalahkan Penendalian Intern Ditjen Pajak yang menurutnya tidak berjalan dengan baik sebagaimana digembar-gemborkan dalam reformasi pajak.

Azhar Susanto (2011) Menyatakan Informasi merupakan salah satu jenis sumber daya paling utama yang dimiliki oleh suatu organisasi apapun jenis organisasinya, namun informasi yang tidak memberikan makna serta tidak bermanfaat bagi penggunanya bukan merupakan informasi bagi pengguna tersebut.

Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisis, mengkomunikasikan informasi pengambilan keputusan dengan orientasi financial yang relevan bagi pihak-pihak luar dan pihak-pihak dalam perusahaan Stephen A dalam Jogianto (2005). Azhar Susanto (2011) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai sekumpulan dari komponen-komponen yang saliang berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pegambil keputusan. Adapun komponen-komponen sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto antara lain : *hardware*, *software*, *brainware, procedure, database, network.*

Lebih lanjut lagi Azhar Susanto (2002) mengungkapkan ada hubungan yang saling menunjang antara sistem informasi akuntansi dengan Pengendalian intern, dapat dikatakan kedua alat tersebut harus berjalan bersamaan dalam suatu perusahaan, sistem informasi yang berlaku berisi bebagai metode dan prosedur, harus mendukung terciptanya kegiatan struktur pengendalian intern, dipihak lain, struktur

pengendalian intern yang dijalankan harus ditunjang oleh sistem informasi akuntansi yang baik, agar struktur pengendalian intern dapat mencapai sasaran.

Dari definisi yang diberikan diatas dapat di jelaskan bahwa Sistem Informasi Akuntasi yaitu mengolah data, data yang diolah sistem informasi akuntansi adalah data yang bersifat keuangan, sistem informasi akuntansi hanya terbatas pada pengolahan data yang bersifat keuangan saja, sehingga informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi hanya informasi keuangan saja serta perlu adannya pengendalian intern untuk menunjang keberhasilan suatu sistem, dan juga dengan adanya pengendalian intern maka akan diperoleh informasi yang berkualitas, informasi yang using, tidak akurat, atau informasi yang sulit dimengerti merupakan informasi yang tidak bermakna bagi pengguna sistem.

Berdasarkan latar belakan yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengendalian Intern dan Implikasinya Pada Kualitas Informasi" (studi kasus pada KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat I).**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

I.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah dengan rumusan sebagi berikut :

1. Pengendalian Intern yang ada di Dirjen Pajak masih tidak berjalan sebagaimana mestinya.
2. Salah satu hal yang salah ditubuh Ditjen Pajak yaitu mengenai interpretasi dari fungsi intelijen dan penyelidikan.
3. Sistem Pencatata data realisasi penerimaan pajak belum terintegrasi.
4. Penerapan SIDJP khususnya MPN dan SIKKA di Kantor pelayanan pajak pratama dirasa lambat.

I.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan penulis diatas, timbul beberapa pertanyaan yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengendalian Intern di KPP Pratama Bandung
2. Bagaimana Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi di KPP Pratama Bandung
3. Seberapa Besar Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengendalian Intern dan implikasinya pada Kualitas Informasi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

I.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini semata-mata adalah hannya untuk rencana penyusunan skripsi. Adapun penggumpulan data dan informasi yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini adalah, Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian intern dan Kualitas informasi di KPP Pratama Bandung.

I.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengendalian Intern dan implikasinya pada Kualitas Informasi.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengendalian Intern di KPP Pratama Bandung.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi di KPP Pratama Bandung.

1.4 Kegunaan penelitian

I.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan saran bagi Kantor Pelayana Pajak Pratama yang mengalami masalah dalam Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengendalian Intern dan implikasinya pada Kualitas Informasi.

I.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

   Hasil peneitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai Pengaruh pengendalian intern terhadap sistem informasi akuntansi dan implikasinya pada kualitas informasi , serta mengatahui gambaran dunia kerja sesungguhnya.

2. Bagi Peneliti lain

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi-informasi yang dibutuhkan bagi peneliti lain yang memiliki meteri bahasan sama, dan penulis berharap peneliti selanjutnya akan lebih baik.

3. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbagan informasi ilmiah yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembagan Ilmu Akuntansi.

4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal dan memberikan kepuasan bagi wajib pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

I.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada:

Tabel 1 1
Lokasi Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung		
No	Nama KPP	Alamat KPP
1	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jl. Ir. Sutami Bandung No.1
2	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Aji Bandung No. 375
3	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Punawarman No. 19-21
4	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl.Soekarno Hatta No. 781
5	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jl.Soekarno Hatta No. 216

I.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu Pelaksanaan Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012.

Tabel 1. 2
Waktu Penelitian

Tahap	Uraian Kegiatan	Bulan					
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Agustus 2012
I	**Tahap Persiapan :**						
	1. Pengajuan Judul Skripsi	■	■				
	2. Buat slite, Persentasi Judul	■	■				
	3. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■	■
	4. Menentukan tempat penelitian	■	■				
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1. Mengajukan Proposal UP		■	■			
	2. Seminar Usulan Penelitian		■	■			
	3. Meminta surat pengantar ke KPP Pratama Bandung	■	■	■			
	4. Penelitian di KPP Pratama Bandung		■	■			
	5. Penyusunan skripsi				■	■	
	6. Pendaftaran siding skripsi					■	■
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1. Menyiapkan draft skripsi					■	■
	2. Sidang akhir skripsi						■
	3. Penyempurnaan laporan skripsi						■
	4. Penggandaan skripsi						■